

## **DINAMIKA SOSIAL-EKONOMI PETANI TEMBAKAU DI INDONESIA: STUDI KESEJAHTERAAN DAN KEBERLANJUTAN**

**Abdullah Yaqin<sup>1</sup>, Muhammad Izul Ridho<sup>2</sup>, Wilda Tul Uluf<sup>3</sup>**

<sup>1,3</sup> Islamic Religius Institute At-Taqwa Bondowoso, Indonesia

<sup>2</sup> Muadalah Education Unit, Raudatul Ulum Islamic Boarding School Jember, Indonesia

[abdullahyaqin0@gmail.com](mailto:abdullahyaqin0@gmail.com)<sup>1</sup>, [mizulridho@gmail.com](mailto:mizulridho@gmail.com)<sup>2</sup>, [wilda.el.lufi@gmail.com](mailto:wilda.el.lufi@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstract :** Tobacco farmers in Indonesia face a variety of complex socio-economic challenges, especially related to their welfare and sustainability of their farming. The welfare of tobacco farmers as producers of cigarette raw materials is not comparable to their contribution to state revenues from cigarette excise. This study aims to analyze the socio-economic dynamics that affect the welfare of tobacco farmers in Indonesia. In addition, this study aims to identify factors that support or hinder the sustainability of tobacco farming businesses. Case studies are used to analyze data related to the welfare of tobacco farmers in Indonesia. This study successfully found; Crop diversification has a positive impact on the economic conditions of tobacco farmer families, such as increasing work productivity and reducing debt traps. The government provides support to tobacco farmers through technical assistance, training, access to modern equipment, and agricultural technology innovations to increase productivity and efficiency. However, tobacco farmers' access to Tobacco Excise Revenue Sharing Funds (DBH CHT) for crop diversification is still minimal and the types of assistance provided are not necessarily in accordance with the needs of farmers in the field. Further research is needed to understand how government policies can be optimized to improve the welfare of tobacco farmers and ensure the sustainability of tobacco farming in Indonesia.

### **ARTICLE HISTORY**

Received: 23 February 2025

Accepted: 19 March 2025

Published: 30 April 2025

### **KEY WORDS**

*Social-Economic, Tobacco Farmers, Well-being, Sustainability*

## Pendahuluan

Sektor pertanian tembakau memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia, terutama di wilayah seperti Jawa Timur. Selain berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sektor ini juga menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak petani. Di Jawa Timur, misalnya, tembakau menyumbang 2,01% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan nilai tambah bruto mencapai Rp 27,321 miliar pada tahun 2016 (Mu'min et al., 2018). Selain itu, industri tembakau juga berperan dalam penciptaan lapangan kerja di sektor formal maupun informal, yang berdampak pada kehidupan jutaan orang di Indonesia (Syakura, 2017).

Namun, meskipun tembakau merupakan komoditas penting, petani menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang cukup signifikan. Banyak di antara mereka mengalami kerugian, terutama karena biaya tenaga kerja rumah tangga yang tidak dibayar. Selain itu, ketergantungan pada tembakau menjadikan mereka rentan terhadap fluktuasi harga dan kebijakan cukai yang dapat memengaruhi pendapatan mereka. Meski demikian, banyak petani tetap bertahan dalam sektor ini karena dorongan keluarga, ketersediaan lahan, serta keterbatasan alternatif ekonomi yang lebih menguntungkan (Irfandianto & Supyandi, 2020).

Di sisi lain, industri tembakau juga menyumbang pendapatan yang besar bagi negara melalui cukai rokok. Pada tahun 2019, penerimaan negara dari cukai tembakau mencapai Rp 143,66 triliun, yang mencakup 95,5% dari total pendapatan cukai (Audrine, 2020). Namun, hal ini menimbulkan dilema kebijakan antara upaya mengurangi konsumsi rokok dan pentingnya produksi rokok bagi penerimaan negara serta lapangan kerja. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang seimbang agar dapat mendukung petani tembakau sekaligus mengatasi tantangan kesehatan masyarakat akibat konsumsi rokok (Audrine, 2020).

Petani tembakau memiliki peran vital dalam rantai pasokan industri rokok, terutama terkait dengan interaksi mereka dengan perusahaan rokok dan perantara. Dalam perspektif analisis hubungan inti-periferi, terlihat bahwa petani tembakau secara struktural tergantung pada perusahaan dan perantara, khususnya dalam hal penentuan harga. Ketergantungan ini menimbulkan dinamika hubungan yang kompleks, di mana posisi petani sering kali kurang menguntungkan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah yang efektif untuk memutus siklus ketergantungan ini dan memberikan lebih banyak kendali kepada petani

dalam interaksi mereka dengan perusahaan rokok dan perantara(Prasetyo et al., 2022).

Di Tanzania, koperasi primer (PCS) memiliki peran krusial dalam sistem pertanian kontrak tembakau. Selain mengoordinasikan penerapan praktik pertanian yang baik, koperasi ini juga bertanggung jawab memastikan kepatuhan terhadap standar tanggung jawab sosial perusahaan, seperti reboisasi dan penerapan praktik tenaga kerja yang etis. Selain itu, koperasi berperan sebagai pengelola proyek pengembangan lokal yang didanai bersama oleh perusahaan pengolahan tembakau Tanzania dan merek rokok global. Kemampuan koperasi dalam memperoleh manfaat ekonomi dari rantai nilai tembakau sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan serta kapasitas mereka dalam bernegosiasi dengan perusahaan pengolahan tembakau(Makoye et al., 2022).

Di Malawi, sistem pertanian kontrak membuka peluang bagi petani kecil untuk memenuhi standar kepatuhan dan ketertelusuran yang ditetapkan oleh produsen rokok. Namun, sistem ini juga berisiko mengecualikan petani yang lebih miskin. Pedagang daun tembakau berperan penting dalam mendiversifikasi ekonomi Malawi serta membantu petani dalam meningkatkan kualitas proses dan produk mereka. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama bagi petani yang kesulitan memenuhi standar yang ditetapkan oleh perusahaan rokok(Moyer-Lee & Prowse, 2015).

Tantangan sosial-ekonomi yang dihadapi petani tembakau sangat beragam dan kompleks. Salah satu kendala utama adalah margin keuntungan yang sangat tipis, bahkan banyak petani tembakau kecil mengalami kerugian. Di Malawi, misalnya, petani tembakau mandiri sering beroperasi dengan kondisi merugi, sementara mereka yang terikat dalam kontrak dengan perusahaan tembakau juga kesulitan memperoleh pendapatan yang layak, sering kali berada di bawah garis kemiskinan nasional. Selain itu, keterbatasan akses ke kredit memaksa banyak petani untuk menandatangani kontrak dengan perusahaan, karena itulah satu-satunya cara bagi mereka untuk mendapatkan pendanaan yang sulit diperoleh melalui jalur lain(Makoka et al., 2016).

Selain tantangan ekonomi, petani tembakau juga menghadapi kesulitan dalam pemasaran dan akses ke pasar. Di beberapa wilayah, seperti Zimbabwe, mereka harus berhadapan dengan harga jual yang rendah, biaya transportasi yang tinggi, serta ketidakadilan harga yang

ditetapkan oleh pedagang tembakau(Muroiwa et al., 2019). Dominasi industri tembakau dalam struktur pasar juga membatasi peluang petani untuk beralih ke jenis pertanian lain yang berpotensi lebih menguntungkan. Kondisi ini semakin diperburuk oleh minimnya pengetahuan serta keterbatasan sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk mengeksplorasi alternatif selain tembakau(Lencucha et al., 2022).

Dari aspek sosial, petani tembakau sering kali terperangkap dalam siklus kemiskinan yang sulit dihindari. Meskipun tembakau dikenal sebagai komoditas bernilai tinggi, banyak petani justru mengalami kerugian finansial serta risiko kesehatan akibat praktik pertanian tembakau. Misalnya, penggunaan tenaga kerja anak serta paparan terhadap penyakit seperti Green Tobacco Sickness merupakan permasalahan umum di kalangan petani tembakau. Selain itu, dampak lingkungan dari budidaya tembakau, seperti deforestasi dan penggunaan bahan kimia secara berlebihan, turut mengancam kesejahteraan jangka panjang komunitas petani (Lencucha & Drope, 2021). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan intervensi yang mempertimbangkan faktor geografis dan teknologi guna membantu petani beralih ke mata pencaharian alternatif yang lebih berkelanjutan(Chapanda, 2016).

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini mengumpulkan data dari literatur hasil penelitian terdahulu baik berupa jurnal, prosiding maupun laporan penelitian. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif yang bertujuan untuk memperkirakan hubungan antara pertanian tembakau dan status kemiskinan. Selain itu, penelitian lain menggunakan metodologi kualitatif.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **Faktor Pendukung Keberlanjutan Usaha Pertanian Tembakau di Indonesia**

Berbagai aspek yang saling berkaitan, termasuk faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan pemerintah, mendukung keberlanjutan usaha pertanian tembakau di Indonesia. Salah satu faktor kunci adalah kontribusi ekonomi yang signifikan dari sektor pertanian tembakau terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), terutama di daerah-daerah seperti Jawa Timur. Di wilayah tersebut, tembakau menjadi komoditas utama yang mendukung perekonomian lokal sekaligus memberikan nilai tambah yang substansial.(Mu'min et al., 2018). Selain itu, kerja sama kontraktual antara perusahaan tembakau dan petani turut berperan

penting dalam menjamin keberlanjutan pasokan tembakau, meskipun kemitraan ini cenderung lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan komersial perusahaan daripada peningkatan kesejahteraan petani.(Susilowati et al., 2018).

Teknologi dan kebijakan juga memegang peranan krusial dalam mendukung keberlanjutan pertanian tembakau. Sebagai contoh, pengembangan tembakau Virginia membutuhkan dukungan teknologi dan kebijakan yang mencakup kesesuaian lahan, teknik budidaya, pengendalian hama, serta teknologi pascapanen dan pengolahan. Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan kebutuhan bahan baku tembakau dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Selain itu, alih pengetahuan tradisional dari generasi tua ke generasi muda di daerah seperti Temanggung juga menjadi faktor penting dalam mempertahankan keberlanjutan agribisnis tembakau.(Runtiko et al., 2019)

Keputusan ekonomi petani tembakau dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat keuntungan dari usaha pertanian, serta kemudahan akses terhadap kredit dan pendidikan. Faktor-faktor ini berperan dalam menentukan apakah petani akan terus menanam tembakau atau beralih ke komoditas lain. Selain itu, aspek finansial, seperti pembayaran secara lump sum dan ketersediaan pinjaman, juga menjadi pertimbangan penting bagi petani dalam mempertahankan usaha pertanian tembakau mereka.(Appau et al., 2019)

Pemerintah turut berperan dalam mendukung keberlanjutan pertanian tembakau melalui program bantuan sosial. Tingginya angka kemiskinan di kalangan petani tembakau, terutama saat hasil panen menurun, menunjukkan bahwa bantuan sosial dari pemerintah berfungsi sebagai bentuk subsidi tidak langsung bagi industri tembakau. Selain itu, penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) oleh perusahaan tembakau juga menjadi strategi penting untuk menjamin keberlanjutan bisnis dalam jangka Panjang.(Muthiah & Anggoro, 2024)

### **Faktor Penghambat Keberlanjutan Usaha Pertanian Tembakau di Indonesia**

Berbagai perspektif, seperti ekonomi, lingkungan, dan kebijakan, mengungkapkan sejumlah faktor yang menghambat keberlanjutan usaha pertanian tembakau di Indonesia. Salah satu tantangan utamanya adalah ketidakstabilan pendapatan dari sektor ini. Penelitian mengindikasikan bahwa banyak petani tembakau menghadapi kerugian finansial, terutama ketika biaya tenaga kerja rumah tangga dimasukkan dalam perhitungan produksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertanian tembakau tidak selalu memberikan keuntungan dan dapat menyebabkan fluktuasi

pendapatan yang signifikan bagi rumah tangga petani.(Sahadewo, Drope, Li, Nargis, et al., 2020)

Selain itu, perubahan iklim menjadi tantangan signifikan bagi keberlanjutan pertanian tembakau. Di wilayah seperti Temanggung, ketidakpastian pola cuaca, seperti curah hujan yang berlebihan atau kekeringan, dapat memicu kegagalan panen dan menurunkan produktivitas tembakau. Dampak langsung dari situasi ini adalah penurunan pendapatan petani yang sering kali lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.(Nurjani et al., 2020)

Dari perspektif kebijakan, regulasi terkait cukai tembakau turut memengaruhi keberlanjutan usaha pertanian tembakau. Kebijakan tersebut berpotensi menurunkan permintaan daun tembakau, yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan petani. Meskipun cukai tembakau memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara, kebijakan ini juga memengaruhi mata pencaharian jutaan petani tembakau serta pekerja yang terlibat dalam industri terkait.(Syakura, 2017)

Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan akses terhadap teknologi dan modal. Sebagian besar petani tembakau di Indonesia masih mengandalkan teknologi tradisional, yang menyebabkan produktivitas mereka lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara penghasil tembakau lainnya. Selain itu, keterbatasan akses terhadap kredit dan fasilitas keuangan sering kali menghambat petani dalam berinvestasi pada teknologi modern atau melakukan diversifikasi usaha mereka.(Appau et al., 2019)

Terakhir, ketimpangan dalam hubungan antara petani dan perusahaan tembakau juga menjadi hambatan. Petani kerap berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat bernegosiasi mengenai harga dan penilaian kualitas daun tembakau. Ketergantungan petani pada perusahaan sebagai pembeli hasil panen membuat mereka sulit memperoleh harga yang layak serta meningkatkan pendapatan secara signifikan.(Sahadewo, Drope, Li, Witoelar, et al., 2020)

### **Analisis Tingkat Kesejahteraan Petani Tembakau di Indonesia**

Kesejahteraan petani tembakau di Indonesia adalah isu yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial. Penelitian mengungkapkan bahwa meskipun tembakau merupakan komoditas unggulan dengan nilai ekonomi yang tinggi, banyak petani tembakau masih menghadapi kondisi kemiskinan. Situasi ini dipicu oleh fluktuasi harga tembakau, ketergantungan pada pasar tembakau, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya yang memadai.(Sahadewo et

al., 2024). Selain itu, kondisi cuaca yang tidak stabil turut memengaruhi hasil panen dan pendapatan petani, yang pada akhirnya berimbas pada tingkat kesejahteraan mereka. (Sahadewo, Drope, Li, Witoelar, et al., 2020)

Beberapa faktor yang memengaruhi kesejahteraan petani tembakau meliputi luas lahan, pengalaman kerja, dan tingkat pendidikan. Penelitian di Desa Banaran, Kabupaten Temanggung, mengungkapkan bahwa luas lahan dan pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan petani tembakau. Namun, pendapatan, tingkat pendidikan, dan konsumsi rumah tangga tidak menunjukkan dampak yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun petani memperoleh penghasilan dari tembakau, faktor lain seperti pendidikan dan diversifikasi usaha juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. (Mebis et al., 2023)

Petani tembakau di Indonesia menghadapi beragam tantangan, termasuk ketidakpastian harga dan kebijakan yang berkaitan dengan industri tembakau. Di Probolinggo, meskipun harga tembakau cenderung tinggi, kondisi ekonomi petani tidak selalu stabil. Fluktuasi harga serta kebijakan, seperti RUU Tembakau, semakin meningkatkan ketidakpastian bagi para petani. Selain itu, larangan agama terhadap merokok juga memengaruhi keputusan petani dalam membudidayakan tanaman tembakau. (Aminah & Ridho, 2024)

Banyak petani tembakau yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, seperti program bantuan tunai dan layanan kesehatan universal. Bantuan ini mencerminkan bentuk subsidi tidak langsung pemerintah terhadap industri tembakau, meskipun tingkat kemiskinan di kalangan petani tembakau masih tetap tinggi. (Sahadewo et al., 2024). Kebijakan seperti Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) juga telah diterapkan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan petani. (Nugroho & Asmorowati, 2024)

Untuk meningkatkan kesejahteraan petani tembakau, diperlukan upaya diversifikasi usaha serta peningkatan akses terhadap teknologi dan informasi. Program seperti *Lahanku Penghidupanku* mendorong petani untuk membudidayakan tanaman lain yang lebih menguntungkan, seperti bawang merah dan semangka. (Pebriaini, 2017). Selain itu, memperluas akses terhadap kredit dan mengembangkan rantai pasokan yang efisien juga menjadi hal penting dalam mendukung peralihan petani menuju mata pencaharian alternatif. (Appau et al., 2019)

Sehingga menurut hemat peneliti diperlukan penguatan kelembagaan petani sebagai solusi krusial. Sehingga penting dilakukan pembentukan atau revitalisasi koperasi petani yang kuat dan mandiri.

Koperasi yang dapat berperan dalam menyediakan akses ke modal dengan bunga rendah, pelatihan teknis pertanian yang modern dan berkelanjutan, serta membantu pemasaran hasil panen dengan harga yang lebih adil. Selain itu, koperasi juga dapat menjadi wadah bagi petani untuk bersuara dan memperjuangkan kepentingan mereka di tingkat kebijakan.

Selain itu perlu disediakan pelatihan dan pendampingan bagi petani mengenai teknik budidaya tembakau yang lebih efisien dan ramah lingkungan, termasuk penggunaan bibit unggul, pengendalian hama dan penyakit terpadu, serta praktik konservasi tanah dan air. Pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi pertanian juga dapat membantu petani dalam memantau harga pasar, cuaca, dan informasi penting lainnya, dengan menggunakan teknologi yang mutakhir.

Terakhir, peneliti hendak menekankan pentingnya peningkatan kesadaran dan pendidikan bagi petani tembakau mengenai dampak kesehatan dan lingkungan akibat budidaya tembakau. Program penyuluhan kesehatan dan lingkungan dapat membantu petani memahami risiko yang terkait dengan penggunaan pestisida dan bahan kimia berbahaya lainnya, serta mendorong mereka untuk beralih ke praktik pertanian yang lebih aman dan berkelanjutan. Dengan kombinasi solusi ekonomi, kelembagaan, teknologi, kebijakan, dan pendidikan, diharapkan kesejahteraan petani tembakau di Indonesia dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

## **Kesimpulan**

Faktor-faktor yang mendukung keberlanjutan usaha budidaya tembakau meliputi kesesuaian kondisi geografis dan iklim, budaya masyarakat setempat, keberadaan lembaga yang mendukung, dan dukungan dari pemerintah daerah. Selain itu, perbaikan produksi dan mutu tembakau secara organik menjadi prioritas utama dalam pengembangan agribisnis tembakau berkelanjutan. Intensitas penyuluhan dan pelatihan mengenai usaha tani tembakau, eksistensi kelompok tani, lembaga layanan pemerintah, dan kebersamaan dalam kerja kelompok juga turut mendukung keberlanjutan usaha tani tembakau. Sementara itu, faktor-faktor yang menghambat keberlanjutan usaha budidaya tembakau antara lain degradasi lahan pertanian, adanya rancangan undang-undang tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan (RUU-PDPTK), dan rendahnya daya tawar petani dalam menentukan harga jual tembakau.

Dalam konteks kesejahteraan petani tembakau, fluktuasi harga tembakau sangat mempengaruhi pendapatan petani. Untuk

mempertahankan keberlanjutan usaha tani tembakau, diperlukan peningkatan intensitas penyuluhan dan pelatihan, serta penggalangan kebersamaan antara pemerintah dan petani tembakau untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, terutama dalam penanganan usaha tani dan pemasaran tembakau. Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan petani tembakau melalui berbagai kebijakan, termasuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Sehingga perlu dilakukan Penguatan kelembagaan petani, khususnya melalui pembentukan atau revitalisasi koperasi yang kuat dan mandiri, merupakan solusi krusial untuk meningkatkan kesejahteraan petani tembakau. Koperasi berperan penting dalam menyediakan akses modal, pelatihan teknis pertanian modern, serta membantu pemasaran hasil panen. Selain itu, pelatihan dan pendampingan mengenai teknik budidaya tembakau yang efisien dan ramah lingkungan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kesadaran mengenai dampak kesehatan dan lingkungan juga diperlukan. Kombinasi solusi ekonomi, kelembagaan, teknologi, kebijakan, dan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani tembakau secara berkelanjutan.

## REFERENCES

- Aminah, F., & Ridho, Z. (2024). Usaha Tani Tembakau Untuk Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Islami Petani Tembakau Di Desa Randumerak Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. *ESA*, 6(1), 1-10.
- Appau, A., Drope, J., Witoelar, F., Chavez, J. J., & Lencucha, R. (2019). Why Do Farmers Grow Tobacco? A Qualitative Exploration of Farmers Perspectives in Indonesia and Philippines. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16, 1-11.
- Irfandianto, M. E., & Supyandi, D. (2020). Why Tobacco Farmers Still Standing? (Case Study In Genteng Village, Sukasari District, Sumedang Regency). *HABITAT*, 1, 28-35.
- Lencucha, R., Drope, J., Magati, P., & ... (2022). Tobacco farming: overcoming an understated impediment to comprehensive tobacco control. *Tobacco ...*, 31, 308-312.
- Makoka, D., Drope, J., Appau, A., Labonté, R., Li, Q., Goma, F., Zulu, R., Magati, P., & Lencucha, R. (2016). Costs, revenues and profits: an economic analysis of smallholder tobacco farmer livelihoods in Malawi. *Tobacco Control*, 26(6), 634-640.
- Makoye, E., Larsen, M., & Kuzilwa, J. (2022). Tobacco Farming and the Reconfiguration of Co-operatives in Tanzania. *Journal of Southern African Studies*, 48, 273-291.

- Mebis, M. F., Khoirudin, R., Afifah, H. L. N., & Abasimi, I. (2023). Analysis Of The Welfare Of Tobacco Farmers In Banaran Village, Tembarak District, Temanggung Regency. *Jurnal Mebis (Manajemen Dan Bisnis)*, 8(2), 109–120.
- Moyer-Lee, J., & Prowse, M. (2015). How Traceability is Restructuring Malawi's Tobacco Industry. *Development Economics: Microeconomic Issues in Developing Economies EJournal*. 11(09), 111.
- Mu'min, M., Anggara, Y. P., & Maulana, R. (2018). Identified Of Tobacco Industry Development In East Java: Error Correction Model Approach And The Triple Layer Business Canvas Model Application. *Journal of Developing Economies*, 3(2), 106–126.
- Muroiwa, J., Mushunje, A., & Musitini, T. (2019). The Institutional and Socio-Economic Constraints to Smallholder Tobacco Production and Marketing in Mount Darwin District of Zimbabwe: The Value Chain Approach. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 10(7).
- Muthiah, M., & Anggoro, Y. (2024). Implementation of ESG as a Strategy for Business Sustainability in a Public-Listed Tobacco Company in Indonesia. *International Journal of Current Science Research and Review*, 7(6), 4362–4371.
- Nugroho, R., & Asmorowati, S. (2024). Implementasi Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 92–101.
- Prasetyo, A., Samudro, B., & Soesilo, A. (2022). Relationship of Cigarette Companies, Middlemen and Tobacco Farmers: Core-Periphery Analysis. *RA Journal of Applied Research*, 8(12).
- Runtiko, A. G., Haryadi, F., & Witjaksono, R. (2019). The Sustainability of Tobacco Agribusiness in Temanggung District, Indonesia: The Perspective of Young-Adult Family Members of Farmers in Three Tobacco Center Villages. *Journal of Sustainable Development*, 12(3), 184–192.
- Sahadewo, G., Drope, J., Li, Q., Nargis, N., & Witoelar, F. (2020). Tobacco or not tobacco: predicting farming households' income in Indonesia. *Tobacco Control*, 30, 320–327.
- Sahadewo, G., Drope, J., Li, Q., Witoelar, F., & Lencucha, R. (2020). In-and-Out of Tobacco Farming: Shifting Behavior of Tobacco Farmers in Indonesia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(9416), 1–16.
- Sahadewo, G., Lencucha, R., Bandara, S., Drope, J., & Witoelar, F. (2024). Assessing the level of poverty and utilization of government social programs among tobacco farmers in Indonesia. *Nicotine & Tobacco Research: Official Journal of the Society for Research on Nicotine and Tobacco*, 26(9), 1132–1140.
- Susilowati, K., Rachmi, A., & Riawajanti, N. (2018). Analysis of Contract Farming Partnership for Sustainable Supply of Tobacco (a Case Study on the Integrated Production System Program of PT. HM Sampoerna Tbk. - Indonesia). *International Journal of Engineering & Technology*, 07(15).

- Nurjani, E., Harini, R., Sekaranom, A., & Mutaqqin, A. (2020). Tobacco farmers Perspective towards increasing climate change risk on agriculture sector: a case study of Temanggung- Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 451.
- Lencucha, R., & Drope, J. (2021). How does tobacco growing impact advancement in demand reduction measures? *Tobacco Prevention & Cessation*, 7.
- Pebriaini, P. A. (2017). *Transfer of Tobacco Functions as an Effort to Control the Health and Prosperity of Tobacco Farmers*. 1, 337-341.
- Audrine, P. (2020). *A Policy Perspective on Tobacco Farming and Public Health in Indonesia*.
- Chapanda, J. (2016). *Assessing the impact of tobacco farming in poverty alleviation: the case of small holder Centenary farmers*.
- Syakura, N. W. (2017). *Impact of Tobacco Control on Tobacco Farmers and State Revenue in Indonesia*. 1, 156-160.